PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL INDONESIA PADA KAPAL PERIKANAN TAIWAN

Oleh : *GUSRIKA SAFITRI*

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,M.H

Alamat : Jln. Kembang Harapan Ujung No 19, Sail , Pekanbaru

Email : gusrikasafitri03@gmail.com - Telepon : 082387703266

ABSTRACT

Opportunities for migrant workers in the field of fisheries, especially boat crews on foreign fishing vessels. Estimating that there are 36 million people involved in fishing and aquaculture activities and 15 million of them are involved in fishing. Activities in the territorial sea are basically subject to coastal state jurisdiction, while in the high seas are subject to international law. With the aim of supporting economic development and increasing national welfare, the Indonesian state has bilateral relations with Taiwan. But in the Indonesian political order it did not establish diplomatic relations with Taiwan based on the politics of One china Policy. Although it does not have diplomatic and consular relations, Indonesia's interests in Taiwan, especially economic and trade interests, are carried out by the Indonesian Economic and Trade Office. As a country subject to international law, when Indonesian citizens come to Taiwan, Taiwan must treat Indonesian citizens as well as treat their own citizens, in accordance with the standard national treatment principle. In fact, there are still many Indonesian citizens who get into trouble in Taiwan, especially Indonesian Ship Fruits working on Taiwan's Fishing Vessels, which have been explored. This problem is caused by the absence of regulations specifically regulating international standard ship crews. The destination country must balance the needs of migrant workers based on the views and needs of the country, while the sending country needs to regulate shipping policies so that the rights of migrant workers can be protected. Ship crew rights: rights to wages, rights to shelter and food, rights to care during illness / accident, rights to leave, right to transport to be repatriated. The authors suggest integrating the guidelines for the protection and safety of migrant workers from various agencies such as the ILO, IMO, and FAO and incorporating these guidelines into the national policies of each country. Indonesia pays more attention to deviations in the suitability of prospective migrant workers on foreign fishing vessels, especially Taiwan.

Keywords: Legal Protection - Indonesian Vessels - Taiwan Fishing Vessels

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sifat migrasi yang transnasional memberikan tantangan berbeda bagi negara tujuan dan negara pengirim. Negara tujuan harus menyeimbangkan kebutuhan pekerja migran berdasarkan pandangan dan kebutuhan negara, sedang negara pengirim perlu mengatur kebijakan pengiriman agar hak-hak pekerja migran dapat dilindungi.¹

Peluang pekerja migran di bidang perikanan khususnya Anak Buah Kapal (selanjutnya disingkat ABK) pada kapal perikanan asing. Di tahun 2000 yang lalu, *Food and Agriculture Organization* (selanjutnya disingkat FAO) memperkirakan terdapat 36 juta orang yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dan budidaya perikanan dan 15 juta diantaranya terlibat dalam penangkapan ikan di laut.² Hal yang dilakukan oleh negara-negara seperti eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang ada di laut serta melakukan kegiatan-kegiatan dibidang perekonomian seperti dibidang perikanan komersial pada kapal penangkapan ikan.

¹International Organization for Migration, Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah, Jakarta: IOM, 2000, hlm. 3.

²Djodjo Suwardjo, dkk., Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal-Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap, *Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan*, Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1 tahun 2010, hlm.61-62.

Kegiatan di laut teritorial pada dasarnya tunduk pada yurisdiksi negara pantai, sedangkan di laut lepas tunduk pada hukum Internasional. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh terhadap perairan pedalaman (teritorial), kapal-kapal asing di dalam perairan tersebut tunduk kepada yurisdiksi negara pantai.³ Meskipun negara pantai dan negara kepulauan memiliki kedaulatan tersebut, namun negara-negara tersebut dibatasi dengan pelbagai kewajiban, antara lain kewajiban menghormati hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing.⁴

Salah satu kedaulatan negara Tujuan penguatan hubungan bilateral tersebut secara umum adalah mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional, melindungi warga negara dan kepentingan Indonesia lainnya di luar negeri, serta mengembangkan kerja sama dalam penanganan isu-isu transnasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut langkah yang diambil antara lain adalah penguatan mekanisme kerja sama bilateral dengan berbagai negara sahabat.⁵ Salah satu hubungan bilateral yang dibina oleh Indonesia adalah dengan Taiwan.

³Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang: 2007. Hlm. 19-20.

⁴Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung:2016 hlm.17.

⁵<http://www.kemenlu.go.id/Dokuments/Buku%20Diplomas%20Indonesia%202010.pdf> di akses pada tanggal 09 Januari 2017, Pukul 19.58.

Pada tatanan politik yang terjadi saat ini, Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Hal ini didasarkan atas politik satu Cina atau dikenal dengan sebutan *One China Policy*. Selama memerintah di Taiwan, *Chang Kai Shek*, yang merupakan pendiri Taiwan tetap menggunakan nama *Republic of China* sebagaimana nama yang digunakan di Tiongkok daratan. Atas dasar itulah kemudian pemerintah Beijing mengeluarkan kebijakan *One China Policy* terhadap Taiwan dan tetap berusaha memperjuangkan kebijakan tersebut di ranah internasional.⁶

Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler berlaku terhadap negara-negara yang telah membuat perjanjian tentang penempatan perwakilan konsuler, tetapi karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, maka Indonesia tidak bisa membuka perwakilan konsuler di Taiwan. Walaupun tidak memiliki perwakilan konsuler, kepentingan Indonesia di Taiwan terutama kepentingan perekonomian dan perdagangan dijalankan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.

Sebagai negara yang tunduk pada hukum internasional, ketika warga negara Indonesia datang ke Taiwan, maka Taiwan harus memperlakukan warga negara Indonesia sama seperti memperlakukan warga negaranya sendiri, yang mana sesuai dengan salah satu prinsip hukum internasional yaitu *national treatment standard*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 *Montevideo*

⁶Fisip12.web.unair.ac.id diakses tanggal 15 Oktober 2016, pukul 11.53 WIB.

Convention On Rights and Duties of States 1993 :

“..... *Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals.*”

Namun, pada kenyataannya masih banyak warga negara Indonesia yang mendapat masalah di Taiwan dan belum tuntas dikarenakan tidak adanya perwakilan diplomatik dan konsuler di negara tersebut.⁷ Pada tahun 2013, sebanyak 203 Anak Buah Kapal (selanjutnya disingkat ABK) asal Indonesia yang direkrut dan dipekerjakan oleh perusahaan ikan asal Taiwan, terlantar di Trinidad dan Tobago. Mereka dipaksa bekerja sepanjang waktu, istirahat hanya 4 jam sehari tanpa hari libur. Selama 30 bulan lebih kapal tidak pernah bersandar dan mereka juga mendapat berbagai tindakan perbudakan lainnya di atas kapal selama berlayar.⁸

Tabel I.1
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan

No	Bidang Industri	Jumlah Tenaga Kerja
1	Perikanan	6.860
2	Manufaktur	52.448
3	Konstruksi	1.333
4	Pekerjaan Sosial	182.495
Total		243.136

⁷<https://m.tempo.co/read/news/2015/07/29/058687586/tki-hadapi-hukuman-mati-di-taiwan-ini-upaya-penyelamatannya> diakses pada tanggal 24 Januari 2017, pukul 20.32 WIB

⁸<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150330170252-20-43028/nasib-abkIndonesia-terkurung-di-laut-angola-makan-seadanya/> diakses tanggal 25 November 2017.

Sumber: diolah dari *Workforce Development Agency*, MOL 2016

Praktek pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering menimpa para pekerja perikanan khususnya ABK, memerlukan aturan hukum yang khusus untuk mengatur mengenai perlindungan akan hak-hak dan kondisi kerja yang layak pada kapal penangkapan ikan yang sesuai dengan standar internasional. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi salah satu pengirim terbesar tenaga kerja di bidang perikanan terutama ABK. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing pada tahun 2015 sebanyak 5.116 orang telah ditempatkan bekerja di kapal berbendera asing di luar negeri dari 30 negara di dunia.⁹

Perjanjian kerja yang dibuat oleh Tenaga Kerja yang bekerja di kapal penangkapan ikan, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia dan peraturan nasional yang berlaku di negara bendera kapal tempat tenaga kerja Indonesia bekerja. Perjanjian kerja inipun tidak selalu memiliki kekuatan hukum ketika mereka bekerja, dikarenakan ketika bekerja tenaga kerja Indonesia di bidang perikanan ini tidak hanya berdiam di satu wilayah teritorial negara saja, namun hingga sampai ke wilayah teritorial negara lain bahkan hingga ke laut lepas.

⁹http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negerisangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64 diakses pada tanggal 11 November 2017.

Aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia guna melindungi Tenaga Kerja Indonesia pelaut yang bekerja pada kapal penangkapan ikan, selama ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.¹⁰ Aturan ini belum memberikan perlindungan bagi para awak kapal yang sesuai dengan standar internasional yaitu mengenai kondisi hidup dan kondisi kerja semua pelaut di bidang perikanan, baik sector perikanan laut maupun sector perikanan darat. Ini berlaku bagi kapal perikanan skala besar dan skala kecil, terbuka dan memiliki geladak serta pelaut yang berada di perikanan tersebut dan pekerja industri perikanan lainnya.

Sehingga penggunaan undang-undang ini membuat pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab, seperti pemilik kapal menjadi lepas tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, demi menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di bidang perikanan di kapal asing seharusnya Indonesia memiliki perundang-undangan nasional yang juga mengacu kepada aturan hukum Internasional yang memberikan aturan yang lebih khusus bagi Anak Buah Kapal dan memberikan paket perlindungan yang sesuai dengan standar Internasional yang diatur dalam *Work In Fishing Convention 2007*. Dimana kapal tersebut akan melapor kepada pelabuhan di bawah yurisdiksi negara tersebut,

¹⁰Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

baik negara bendera maupun negara pelabuhan memenuhi standar-standar yang ada dalam konvensi ini.¹¹

Mengingat bahwa Indonesia belum meratifikasi *International Labour Organization Convention (Work In Fishing Convention 2007 (No.188))*. Ketentuan standar-standar ketenagakerjaan pekerja migran bidang perikanan di kapal asing, dalam *International Labour Organization Convention (Work In Fishing Convention 2007)* bertitik fokus pada 4 aspek yaitu Standar Minimal Umur Pekerja Bidang Perikanan (Pasal 9). Standar Upah Pekerja Migran Bidang Perikanan di Kapal Perikanan Asing (Pasal 23 dan Pasal 24). Standar Jam Kerja dan Jam Istirahat di Kapal Perikanan (Pasal 13). Standar Kelayakan Hidup Setiap Pekerja di Atas Kapal Perikanan (Pasal 25 sampai Pasal 28).

Adapun hal-hal yang mendasari pembentukan konvensi ini adalah konvensi ILO No. 185 tahun 2003 mengenai *Concerning Revising Seafarers' Identity Documents Convention, 1958*. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958. Dimana dalam Konvensi ini telah diatur lebih khusus mengenai standar-standar dokumen kelengkapan secara Internasional yang seharusnya diberikan kepada TKI pelaut. Namun pada praktiknya tidak dilaksanakan hingga saat ini. Sehingga semakin

¹¹Buletin KIARA, *Kabar Bahari, Perbudakan di Perdagangan Ikan dunia*, edisi Juli-Agustus 2014, Jakarta, hlm. 30.

mempersulit keadaan para TKI pelaut yang bekerja sebagai pelaut pada kapal perikanan asing di berbagai negara.

Sementara itu, pekerja migran yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan asing kerap mengalami kekerasan dan eksploitasi.¹² Serta perlakuan eksploitatif oleh para pekerja asal negara pemilik kapal yang menyebabkan pekerja migran mengalami tindakan kekerasan dan tekanan kerja yang berat yang menimbulkan depresi hingga kematian pekerja migran.¹³ Adapun Negara tempat terjadinya kasus tersebut diantaranya : Australia, Somalia, Malaysia, Korea Selatan, Mozambik, Afrika Selatan, Amerika, Angola, Wilayah Asia Pasifik, Fiji, Mauritius, Italia, Taiwan, Thailand, Spanyol, Papua Nugini, Filipina, Argentina, Rusia, Inggris, Togo, Peru, Jepang, Hawaii dan Colombo dst.¹⁴

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat permasalahan inidalam proposal skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum anak buah kapal pada

¹²<https://www.nasional.tempo.co/read/826721/nasib-pilu-abk-indonesia-di-kapal-asing-minum-air-dari>, diakses, tanggal, 9 Desember 2017.

¹³Muhammad Nur, “Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan Di Kapal Perikanan Asing”, *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 9.

¹⁴<http://kapi.kkp.go.id/news/2012/04/kasus-awak-kapal-perikanan-indonesia-di-luar-negeri>> diakses tanggal 25 Februari 2017.

kapal perikanan asing berdasarkan hukum internasional?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia pada kapal perikanan Taiwan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuainya perlindungan hukum anak buah kapal pada kapal perikanan asing berdasarkan hukum internasional.
- b. Diketuainya perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia pada kapal perikanan Taiwan.

D. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum anak buah kapal yang bekerja di kapal Taiwan.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu hukum internasional.
 - 2) Bagi pemerintah khususnya bagi Kementerian Ketenagakerjaan dan bagi instansi terkait yang melakukan kerja sama internasional dengan berbagai negara untuk melindungi pekerja migran yang bekerja pada kapal asing khususnya Anak

Buah Kapal yang berstandar Internasional.

E. Kerangka Teori

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia lebih tinggi dari manusia lain. Hanya satu yang mutlak yaitu Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya sebagai *Prima Facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.¹⁵ Todung Mulya Lubis menyebutkan ada empat teori Hak Asasi Manusia, yaitu:¹⁶

- a) Hak-hak alami (*natural right*),
- b) Teori positivis (*positivist theory*)
- c) Teori relativis cultural (*cultural relativist theory*),
- d) Doktrin Marxis

2. Teori Pertanggungjawaban Negara

Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggung atas perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban. Misalnya perbuatan negara menolak seorang warga negara asing yang masuk ke dalam

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar Geafika, 2012, hlm. 199.

¹⁶ El Muhtaj Madja, *Op. Cit*, hlm. 5-6.

negaranya.¹⁷ Dapat dikatakan bahwa keberadaan konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah untuk mencegah terjadinya konflik antar negara, disamping juga bertujuan memberikan perlindungan hukum.

3. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸
2. Anak Buah Kapal (ABK) adalah setiap orang yang bekerja di atas kapal perikanan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁹
3. Kapal asing adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksploitasi perikanan yang berbendera asing.²⁰
4. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang

¹⁷ F Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta: 1998, hlm. 77.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm.54.

¹⁹ Mas Achmad Santosa, *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*, As@-prima Pustaka, Jakarta Timur: 2016, hlm.63.

²⁰ Triyadi Andani, "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Hukum Laut Indonesia", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm.12.

di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan dan pengolahan ikan.²¹

4. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria asas-asas hukum. Penelitian yang membahas tentang perbandingan hukum ini penulis gunakan dikarenakan berkaitan dengan perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia pada kapal perikanan asing.

2. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. *Univeral Deklaration of Human Right 1948 (Deklarasi Univeral Hak Asasi Manusia 1948)*.
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- f. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

²¹ *Ibid.*

Kerja Indonesia di Luar Negeri.

- g. *Internasional Labour Organization Convention (Work in Fishing Convention, 2007 (No.188))*.
- h. Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
- i. Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.
- j. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- 2) Kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang

berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²³ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.²⁴

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Pada Kapal Perikanan Asing Berdasarkan Hukum Internasional

Berbagai permasalahan yang dialami para pekerja perikanan mulai dari upah yang di bawah standar hingga pada kejahatan yang terkait dengan nyawa para pekerja. Permasalahan ini pada dasarnya dapat dicegah jika berbagai persiapan diberikan dan dipahami untuk setiap pekerja sebelum mereka dikirim untuk bekerja ke kapal-kapal perikanan di berbagai negara.²⁵

Instrument-instrumen hukum internasional telah banyak dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran bidang perikanan ini. Secara umum para pekerja migran bidang perikanan masuk dalam kategori

²³Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm.71.

²⁴*Ibid.*

²⁵ <http://tempo-institute.org/wp-content/uploads/2018/03/1-Investigasi-Budak-Indonesia-di-Kapal-Taiwan.pdf>

²²Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 106.

perlindungan pekerja migran yang diatur dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* 2000 yang mengatur perlindungan dan ketentuan dasar bagi pekerja migran dan keluarganya, memberikan pedoman tentang penerapan ketentuan perjanjian hak asasi manusia yang ada bagi buruh migran, yang ditujukan untuk melindungi dan mendorong pemenuhan hak maupun martabat secara bebas dan setara tanpa membedakan dengan pekerja lainnya. Organisasi regional juga telah membuat kerangka normatif mereka sendiri. Di Asia Tenggara misalnya, ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Buruh Migran yang dikeluarkan pada KTT ASEAN ke-12 (Januari 2007).²⁶

Upaya juga dilakukan oleh *South East Asia Human Rights Institution Forum* (SEANF) untuk mendukung dan mengembangkan instrumen ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi terhadap Hak-Hak Buruh Migran, sebagai kelanjutan dari Deklarasi ini.²⁷ Sementara itu, “Deklarasi Dhaka”

²⁶South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF), 2010, *SEANF Paper on Migrant Workers*, disitir oleh Bassina Farbenblum, dkk., 2013, *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, Amerika Serikat: Open Society Foundations, hlm. 29-30.

²⁷Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, 2005, *Konvensi Internasional tentang Buruh Migran dan Komitennya, Lembar Fakta No. 24 (Rev. 1)*, New York/Geneva: United Nations, disitir oleh Bassina Farbenblum, dkk., 2013, *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, Amerika Serikat: Open Society Foundations, hlm. 30.

yang difokuskan pada migrasi yang bermartabat diadopsi pada 2011 oleh Proses Kolombo, suatu proses konsultasi menteri regional tentang migrasi tenaga kerja bagi negara-negara asal di Asia.²⁸

Namun, pengaturan secara khusus terkait pekerjaan di bidang ini juga telah diatur dalam berbagai instrument internasional yang disusun oleh ILO, IMO atau FAO. Berbagai instrument internasional terkait yaitu *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel (STCW-F) 1995*, *Seafarer's Identity Documents Convention 2003*, *Recruitment and Placement of Seafarers Convention 1996*, *Repatriation of Seafarers Convention (Revised) 1987*, *Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention 1987*, *Minimum Age (Fishermen) Convention 1959*, *Seafarers Hours of Work and the Manning of Ships Convention 1996*, *Accommodation of Crews (Fishermen) Convention 1966* beserta ketentuan tambahannya yaitu *Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention 1970*, *Social Security (Seafarers) Convention (Revised) 1987*, *Social Security (Minimum Standards) Convention 1952*, *Safety Recommendations for Decked Fishing Vessels of Less than 12 metres in Length and Undecked Fishing Vessels*, dan pada tahun 2007 telah disahkan sebuah

²⁸Colombo Process, 2011, *Deklarasi Dhaka oleh Negara Anggota Colombo Process*, disitir oleh Bassina Farbenblum, dkk., 2013, *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, Amerika Serikat: Open Society Foundations, hlm. 30.

konvensi yang konsen mengatur pekerjaan di bidang perikanan yaitu *Work in Fishing Convention 2007* beserta rekomendasinya.

International Labour Organization (ILO) telah mengidentifikasi perikanan komersial sebagai pekerjaan yang berbahaya dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang sangat tinggi di dunia.²⁹ Pekerjaan pada kapal penangkap ikan ini memiliki resiko yang tinggi karena berada di laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bersifat kotor dikarenakan berhadapan dengan ikan yang mudah membusuk, menggunakan berbagai alat penangkapan ikan, dan lokasi penangkapan ikan yang selalu berpindah-pindah hingga jangkauan wilayahnya akan sangat luas yang melampaui batas-batas teritorial suatu negara bahkan sampai ke laut lepas. Besarnya jangkauan wilayah kerja tersebut mengakibatkan lamanya pelayaran kapal-kapal penangkap ikan bervariasi. Masa pelayaran kapal-kapal di pengaruhi oleh ukuran kapal yang digunakan. Kapal berukuran kecil biasanya hanya berlayar satu hari sedangkan kapal besar bisa berlayar hingga berbulan lamanya.³⁰

²⁹Djojo Suwardjo, dkk., *Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan Dan PPS Cilacap*, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1 tahun 2010, hlm.61-62.

³⁰Gurdun Petursdottir, Olafur hannibalson dan Jeremy MM. Turner, 2001, Safty At Sea as an Integral Part of Fihseries Management. Food and Agriculture Organization of The United Nation, dikutip dalam Djojo Suwardjo, dkk., *Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan Dan PPS Cilacap*,

Perlindungan hukum terhadap ABK perikanan ini menjadi tanggung jawab dari negara asal ABK dan negara tempat ABK bekerja, serta juga memberikan tanggung jawab dalam beberapa hal kepada negara pelabuhan. Tanggung jawab dari negara asal dan negara tempat ABK bekerja dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat sebelum ABK bekerja pada kapal penangkapan ikan antara ABK dan pemilik kapal yang disebut perjanjian kerja awak kapal. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal ABK dan negara bendera kapal.

Perjanjian kerja ini akan sangat berperan penting bagi ABK ketika yurisdiksi dari negara bendera kapal berlaku, yaitu ketika mereka berada di negara bendera kapal dan berada di laut lepas yang tentu saja dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara bendera kapal. Sementara tanggung jawab dari negara pelabuhan seharusnya terlihat ketika kapal penangkap ikan tempat ABK bekerja memasuki wilayah teritorial dari negara pelabuhan, sehingga yurisdiksi negara pelabuhan berlaku terhadap kapal dan para awaknya terlepas dari kebangsaan kapal dan awaknya. Namun pada kenyataannya banyak diantara mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan dari negara asal maupun dari negara dimana mereka bekerja, serta dari negara pelabuhan. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi

Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1 tahun 2010, hlm. 62.

salah satu pengirim terbesar tenaga kerja di bidang perikanan terutama ABK. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing berturut-turut pada tahun 2011 sebanyak 4.371 orang, 2012 sebanyak 5.123 orang, 2013 sebanyak 5.559, 2014 sebanyak 4.810 orang, dan tahun 2015 (hingga Februari) sebanyak 5.116 orang telah di tempatkan bekerja di kapal berbendera asing di luar negeri dari 30 negara di dunia.³¹ Berbagai permasalahan sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing yang terjadi pada saat pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.

Sejak tahun 2005 sampai tahun 2015 telah banyak terjadi berbagai kasus yang dialami oleh para Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia bidang perikanan yang bekerja di kapal perikanan Asing. Menurut catatan buruh migran persoalan yang dialami oleh ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal asing 92% dialami oleh ABK yang bekerja di kapal ikan dan hanya 8% dialami oleh mereka yang bekerja di kapal niaga.³²

³¹<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/9772-bnp2tki-hnsi-tandatangani-mou-peningkatan-kompetensi-tki-pelaut-perikanan.html> dan http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64 diakses pada tanggal 11 November 2015 pukul 13.37 WIB.

³²http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64

Kasus-kasus yang sering menimpa ABK Indonesia ini diantaranya: kecelakaan, perkelahian, perdagangan manusia, disharmonisasi dengan kapten kapal, tidak terpenuhinya hak-hak, dan terjadi tindak kekerasan.³³

Salah satu kasus yang menimpa ABK Indonesia ini adalah kasus yang terjadi pada tahun 2013 lalu, sebanyak 203 ABK asal Indonesia yang direkrut dan dipekerjakan oleh perusahaan ikan asal Taiwan yang terlantar di Trinidad dan Tobago. Mereka dipaksa bekerja sepanjang waktu, istirahat hanya 4 jam sehari tanpa hari libur. Selama 30 bulan lebih kapal tidak pernah bersandar dan mereka juga mendapat berbagai tindakan perbudakan lainnya di atas kapal selama berlayar, dimana kasus ini masih belum selesai sampai sekarang.³⁴

Selain kasus diatas juga masih banyak kasus lainnya yang menimpa awak kapal asal Indonesia yang didominasi oleh kasus perbudakan terhadap ABK terjadi di beberapa negara di antaranya: Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Tiongkok, Angola, wilayah perairan Asia Pasifik, Amerika dan Afrika.³⁵ Dalam kasus-kasus tersebut terlihat minimnya perlindungan dan standar yang layak bagi para ABK asal Indonesia untuk bekerja.

Untuk langkah penempatan tenaga kerja di kapal perikanan

³³<http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan> diakses pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.54 WIB.

³⁴<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150330170252-20-43028/nasib-abk-indonesia-terkurung-di-laut-angola-makan-seadanya/> diakses pada 25 November 2015, pukul 16.00 WIB.

³⁵ *Ibid.*

asing, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.³⁶ Dalam setiap fasenya selalu melibatkan pola hubungan antara tenaga kerja, pengusaha penempatan dan pemerintah selaku pembuat kebijakan serta pihak pemilik perusahaan tempat para tenaga kerja ditempatkan.

Perlindungan dalam setiap fase tersebut sangat dibutuhkan guna memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut dibutuhkan karena adanya kemungkinan perendahan atas hak asasi manusia, pelanggaran hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja asal Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing hingga ke tempat asal.

Proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada umumnya sangat berbeda dengan penempatan tenaga kerja pelaut Indonesia (TKI Pelaut), demikian pula perbedaan dengan TKI pelaut yang bekerja di kapal perikanan dengan TKI pelaut yang bekerja di kapal cargo. Perjanjian kerja yang dibuat oleh TKI pelaut yang bekerja di kapal penangkapan ikan, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia

³⁶I Dewa Rai Astawa, *Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 2006, hlm.3.

dan peraturan nasional yang berlaku di negara bendera kapal tempat TKI bekerja. Perjanjian kerja inipun tidak selalu memiliki kekuatan hukum ketika mereka bekerja, dikarenakan ketika bekerja TKI pelaut ini tidak hanya berdiam di satu wilayah teritorial negara saja, namun hingga sampai ke wilayah teritorial negara lain bahkan hingga ke laut lepas.

B. Perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia pada kapal perikanan Taiwan

Indonesia merupakan negara dengan pengirim Tenaga Kerja Indonesia sebagai Anak Buah Kapal perikanan terbanyak ke Taiwan, berdasarkan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan pada tahun 2016 sebanyak 64,03% ABK perikanan dari seluruh jumlah ABK perikanan asing di Taiwan. Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk bekerja menjadi ABK perikanan Taiwan karena Taiwan memiliki daya tarik yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang atau Korea, hal tersebut dikarenakan untuk menjadi ABK perikanan di Taiwan tergolong lebih mudah, karena tidak memerlukan kompetensi yang tinggi serta untuk upahnya juga tidak jauh berbeda dengan Jepang atau Korea.³⁷

Pekerjaan menjadi ABK perikanan tergolong berbeda dengan TKI pada sektor lain seperti PRT atau di industri perakitan. Perlindungan hukum dan

³⁷Hafriz Resa Damarsidi, "Eksplorasi Tenaga Kerja Indonesia sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan", *Journal of International Relations*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Volume 3, No. 4, 2017, hlm. 40-48

pengawasan merupakan perbedaan yang menonjol, hal ini dikarenakan untuk menjadi ABK perikanan Taiwan mereka tentu ditempatkan di kapal ikan yang notabene berada di tengah laut baik internasional maupun teritori Taiwan sehingga dibutuhkan peraturan khusus untuk melindungi mereka.³⁸

Dengan tingginya angka penempatan ABK perikanan Taiwan, maka pemerintah Indonesia tentu mengemban kewajiban yang lebih berat untuk mengawasi serta melindungi mereka. Namun berdasarkan BNP2TKI [ada 2015 terdapat banyak masalah-masalah yang menimpa ABK perikanan. Permasalahan ABK perikanan diantaranya gaji tidak dibayarkan, kekerasan fisik maupun mental, serta jam kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja (KDEI-Taipei). Akibat dari banyaknya permasalahan tersebut, BNP2TKI melakukan penundaan penempatan sementara atau moratorium yang dilakukan pada awal tahun 2015 hingga akhir 2015. Tetapi masalah yang menimpa ABK perikanan Taiwan masih terjadi. Seperti kasus penganiayaan yang dilakukan oleh kapten kapal hingga menyebabkan ABK perikanan tewas.³⁹

Masalah-masalah yang menimpa ABK perikanan bukan hanya dari majikan saja. Pada kenyataannya faktor dalam negeri juga ikut andil dalam munculnya permasalahan tersebut, hal tersebut dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai ABK perikanan. Sehingga dalam pelaksanaannya

masih banyak agensi penyalur ABK perikanan yang merekrut mereka secara abal-abal sehingga mereka tidak dibekali kemampuan yang harusnya dimiliki ABK perikanan, seperti buku pelaut dan basic safety training yang asal-asalan.⁴⁰

1. Sistem Ketenagakerjaan Taiwan

Proses Penempatan TKI dari Indonesia ke Taiwan dilakukan dengan skema *Private to Private* yaitu dilakukan dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PTKIS) yang berhubungan agency di Taiwan. Penempatan TKI di Taiwan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah Taiwan, dikarenakan tidak ada hubungan diplomatik/ menganut sistem *one china policy*. UU Ketenagakerjaan Taiwan (*Labour Standard Law & Employment Service Act*)⁴¹

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum anak buah kapal pada kapal perikanan asing berdasarkan hukum internasional terhadap berbagai permasalahan yang dialami mulai dari upah yang dibawah standar hingga pada kejahatan yang terkait dengan nyawa para pekerja. Permasalahan ini pada dasarnya dapat dicegah jika berbagai persiapan diberikan dan dipahami untuk setiap pekerja sebelum mereka dikirim untuk ke kapal-kapal perikanan diberbagai negara.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ <http://regional.kompas.com/read/2016/05/25/08301971/penyiksaan.tki.hingga.te.was.di.atas.kapal.terekam.kamera.video>

⁴⁰ <http://www.righimarine.com/blog/permasalah-abk-dantips-memilih-perusahaan-agensi-perekutan-kapal-perikanan>

2. Perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal perikanan taiwan pada dasarnya diawali dengan indonesia melalui pengaturan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara umum adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

B. SARAN

1. Melakukan integrasi pedoman perlindungan dan keselamatan pekerja migran dari berbagai instansi seperti ILO, IMO dan FAO, serta penggabungan panduan ini ke dalam kebijakan nasional setiap negara.
2. Indonesia lebih memperhatikan terjadinya penyimpangan dalam penempatan calon buruh migran di kapal perikanan asing

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang: 2007
- Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung:2016
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar Geafika, 2012
- F Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta: 1998
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000
- Mas Achmad Santosa, *Alam pun Butuh Hukum & Keadilan*, As@-prima Pustaka, Jakarta Timur: 2016

B. Jurnal/Majalah/Kamus/Skripsi

- I Dewa Rai Astawa, *Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 2006

International Organization for Migration, Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah, Jakarta: IOM, 2000

South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF), 2010, *SEANF Paper on Migrant Workers*, disitir oleh Bassina Farbenblum, dkk., 2013, *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, Amerika Serikat: Open Society Foundations.

Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, 2005, *Konvensi Internasional tentang Buruh Migran dan Komitennya, Lembar Fakta No. 24 (Rev. 1)*, New York/Geneva: United Nations, disitir oleh Bassina Farbenblum, dkk., 2013, *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, Amerika Serikat: Open Society Foundations.

Colombo Process, 2011, *Deklarasi Dhaka oleh Negara Anggota Colombo Process*, disitir oleh Bassina Farbenblum, dkk., 2013, *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia*, Amerika Serikat: Open Society Foundations, hlm. 30.

Djojo Suwardjo, dkk., *Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan Dan PPS Cilacap*, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1 tahun 2010.

Gurdun Petursdottir, Olafur hannibalsen dan Jeremy MM. Turner, 2001, Safty At Sea as an Integral Part of Fihseries Management. Food and Agriculture Organization of The United Nation, dikutip dalam Djojo Suwardjo, dkk., *Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan Dan PPS Cilacap*, Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1 tahun 2010.

Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

- di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009
- Triyadi Andani, “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Hukum Laut Indonesia”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016
- Muhammad Nur, “Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan Di Kapal Perikanan Asing”, *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014
- Buletin KIARA, *Kabar Bahari, Perbudakan di Perdagangan Ikan dunia*, edisi Juli-Agustus 2014, Jakarta
- Djodjo Swardjo, dkk., Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal-Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi Di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap, *Jurnal Teknologi Perikanan & Kelautan*, Universitas Pertanian Bogor Vol. 10, No.1 tahun 2010
- Hafriz Resa Damarsidi, “Eksplorasi Tenaga Kerja Indonesia sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan”, *Journal of International Relations*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Volume 3, No. 4, 2017
- C. Peraturan Perundang-undangan**
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- D. Website**
[http://www.kemenlu.go.id/Dokuments/Buku %20Diplomas%20Indonesia%202010.pdf](http://www.kemenlu.go.id/Dokuments/Buku%20Diplomas%20Indonesia%202010.pdf) di akses pada tanggal 09 Januari 2017,
Fisip12.web.unair.ac.id diakses tanggal 15 Oktober 2016
<https://m.tempo.co/read/news/2015/07/29/058687586/tki-hadapi-hukuman-mati-di-taiwan-ini-upaya-penyelamatannya> diakses pada tanggal 24 Januari 2017
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150330170252-20-43028/nasib-abkindonesia-terkurung-di-laut-angola-makan-seadanya/> diakses tanggal 25 November 2017.
http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negerisangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64 diakses pada tanggal 11 November 2017.
<https://www.nasional.tempo.co/read/826721/nasib-pilu-abk-indonesia-di-kapal-asing-minum-air-dari>, diakses, tanggal, 9 Desember 2017
<http://kapi.kkp.go.id/news/2012/04/kasus-awak-kapal-perikanan-indonesia-di-luar-negeri> diakses tanggal 25 Februari 2017
<http://tempo-institute.org/wp-content/uploads/2018/03/1-Investigasi-Budak-Indonesia-di-Kapal-Taiwan.pdf>
<http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/9772-bnptki-hnsi-tandatangani-mou-peningkatan-kompetensi-tki-pelaut-perikanan.html> dan
http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64 diakses pada tanggal 11 November 2015.
http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64
<http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan> diakses pada tanggal 13 November 2015
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150330170252-20-43028/nasib-abk-indonesia-terkurung-di-laut-angola-makan-seadanya/> diakses pada 25 November 2015
<http://regional.kompas.com/read/2016/05/25/08301971/penyiksaan.tki.hingga.te.was.di.atas.kapal.terekam.kamera.v.ideo>.
<http://www.righimarine.com/blog/permasalahan-abk-dantips-memilih-perusahaan-agensi-perekutan-kapal-perikanan>